

TUGAS AKHIR

**SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
CABANG PEKANBARU**

*Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya
dari Universitas Sultan Syarif Kasim Riau*

Oleh:

SITI JUWARIAH

NIM: 01072203571



**JURUSAN MANAJEMEN PERUSAHAAN D3
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

2013

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Zat Wajibal Wujud Allah SWT. Karena dengan keridhaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Adapun judul skripsi minor ini adalah Sistem Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru. Pembuatan skripsi minor ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Ahli Madya (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

Dalam penulisan penelitian ini penulis telah banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Yth:

1. Kepada keluargaku yang tercinta, Ayahanda (Bajuri), Ibunda (Siti Mu'awiyah), kakakku (Nurul Hidayati, S.sos) dan adikku (Ahmad Zuhri) yang tiada bosan-bosannya memberikan motivasi dan do'a yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan pengorbanan yang telah diberikan dibalas oleh Allah Swt. Amiiiiinnn.....

2. Kepada Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau sebagai Pemimpin.
3. Bapak DR. Mahendra Romus, SP,M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Riki Hanri Malau, SE,MM, selaku Ketua Jurusan Manajemen Perusahaan Fekonsos UIN Suska Riau yang juga telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam hal menyelesaikan skripsi minor ini.
5. Ibu Ratna Dewi, S.sos, Msi, selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Perusahaan yang telah memberikan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi minor ini.
6. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, Msi, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi minor ini yang telah banyak mngorbankan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fekonsos yang telah melancarkan perizinan penelitian.
8. Seluruh Staff dan Keyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru yang telah membimbing penulis selama melakukan penelitian dan membantu dalam penyelesaian skripsi minor ini.
9. Untuk sahabat-sahabatku Jurusan Manajemen Perusahaan angkatan '10 yang tidak bias disebutkan satu persatu (Suryani, Nurasmah, Ela Matra utami, Subur Wijaya, Zulkifli, M. Fadilah, Rina Suci Yanti, Dll).
10. Untuk teman-teman kosku Mbak Iin Selfiyanti, Mbak Sobiyah, Mbak Tatik Ariyani, Mbak Suryanik Sugiono, Karlina Khusnul khotimah, Ahmad Siswono,

Agung Widiyanto, Yuda Deva Gustiranda, yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik.

11. Semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi minor ini, mudah-mudahan kita semua diberkati dan di Ridhoi oleh Allah swt. Amiiinn.....

Akhirnya hanya kepada sang maha kuasa, maha pemilik alam semesta tempat semuanya kembali, semoga amal baik yang teman-teman semua telah berikan semoga di Ridhoi oleh Allah SWT. Amiiinnn.....

Pekanbaru, 21 Mei 2013

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

PERSEMBAHAN.....i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABEL.....vi

DAFTAR GAMBAR.....vii

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.....1
2. Perumusan Masalah.....6
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....6
4. Metode Penelitian.....7
5. Sistematika Penulisan.....8

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1. Sejarah Singkat Perusahaan.....10
2. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia.....15
3. Struktur Organisasi.....15

4. Tugas dan Wewenang Organisasi.....	18
---------------------------------------	----

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. TINJAUAN TEORI

1. Pengertian Bank.....	23
2. Perbedaan Bank Syari'ah Dengan Bank Konvensional.....	24
3. Pengertian Pembiayaan Mudharabah.....	25
4. Konsep Bunga dan Bagi Hasil.....	29
5. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah	34
6. landasan Syari'ah.....	35
7. Jenis-Jenis Mudharabah.....	37
8. Syarat Dan Rukun Mudharabah.....	38
9. Ketentuan Penyaluran Dana Pembiayaan Mudharabah.....	39
10. Sistem Penyeleksian Untuk Mengurangi Risiko Pembiayaan Mudharabah.....	41
11. Kredit Macet (Pembiayaan Bermasalah)	43
12. Restrukturasi Pembiayaan Bermasalah.....	44

B. TINJAUAN PRAKTEK

1. Sistem Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru.....	45
2. Syara-syarat Permohonan Pembiayaan Mudharaba.....	52
3. Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk Persetujuan Pembiayaan Mudharabah.....	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah yang merupakan salah satu perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum syariah. Perbankan syariah di Indonesia berawal dari priode 1980-an sampai sekarang. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioner bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Sektor perbankan yang merupakan salah satu sektor yang menunjang perekonomian Indonesia, dirasakan telah memberikan peranan yang cukup besar didalam menghimpun dana masyarakat yang nantinya disalurkan lagi ke masyarakat tersebut dalam bentuk kredit yang berguna untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional, sehingga peranan perbankan di dalam aktifitasnya menghimpun dana masyarakat perlu ditingkatkan secara terus menerus.

Kemunculan bank syari'ah sebagai suatu insitusi bisnis keuangan prinsip-prinsip yang dianut dalam syari'ah islam, menghadirkan nuansa baru dalam kehidupan soaial ekonomi masyarakat dunia termasuk Indonesia.

Sistem yang dihadirkan bank syari'ah seakan menjadi salah satu harapan solusi berbagai kondisi keterpurukan ekonomi yang sedang dialami dunia saat ini. Secara prinsip bank syari'ah mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, kemitraan, dan universal. Secara operasional prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil yang meniadakan transaksi berbasis bunga seperti yang dipraktikkan oleh perbankan konvensional. Praktik transaksi penggunaan dana dan pembebanan bunga yang selama ini banyak dipraktekkan, terbukti retan dan membawa dampak buruk pada perekonomian. Indonesia pernah menjadi saksi bahwa hal ini berakibat fatal, sehingga ditutupnya operasional beberapa bank pada masa krisis moneter pada tahun 1998. (Yusak Laksmiana, 2009).

Perkembangan bank syari'ah di Indonesia tergolong pesat. Dalam waktu yang singkat banyak bank-bank yang bersifat konvensional akhirnya membuka cabang perbankan yang bersifat syari'ah. Perusahaan-perusahaan perbankan tersebut bukanlah sekedar mencoba untuk mengembangkan prinsip syari'ah di Indonesia, tetapi faktor yang lebih penting adalah permintaan masyarakat untuk dibentuknya perbankan syari'ah.

Bank syari'ah atau bank bagi hasil merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Di dalam operasinya bank syari'ah mengikuti aturan Al-Qur'an, Hadist dan regulasi dari pemerintah. Sesuai dengan perintah dan larangan syari'ah, maka praktik-praktik bisnis yang dilakukan dizaman Rasulullah. Perbedaan pokok antara bank syari'ah dengan bank konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi bank syari'ah, riba

dilarang sedangkan jual-beli (al-bai) dihalalkan. Ini berarti membayar dan menerima bunga atas yang dipinjam/dipinjamkan adalah dilarang. Dalam operasinya, baik dalam kegiatannya penghimpun dana dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat, bank syari'ah (bank bagi hasil) tidak memperhitungkan bunga tetapi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil (**Martono, 2002:94**).

PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang pekanbaru merupakan salah satu cabang Bank Muamalat Indonesia yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat tanpa adanya sistem bunga. Dalam kegiatannya penyaluran dana, bank syari'ah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan keuntungan yang diperoleh tergantung pada kinerja usaha menjadi objek penyertaan tersebut, sesuai nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syari'ah menyediakan dana, guna memenuhi kebutuhan nasabah yang memerlukan dana dan layak memperolehnya. Keduanya dimasukkan dalam istilah "pembiayaan".

Bank Muamalat sebagai bagian integral dari perbankan di Indonesia, tugas usahanya diarahkan pada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional. Bank Syari'ah juga sangat efektif menjalankan fungsi intermediasi, menyalurkan dana masyarakat ke sektor produktif melalui berbagai jenis pembiayaan. Kegiatan Bank Syari'ah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana bagi pengembangan dan peningkatan

usaha, mereka kembangkan dengan memperkenalkannya dalam bentuk : tabungan, deposito dan giro. Jenis produk yang dipasarkan Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dibagi dalam dua kategori yaitu kelompok produk penyimpanan dana (*Shahibul maal*) dan kelompok produk pengelola dana (*Mudharib*). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat ditabel berikut:

Tabel 1.1 : Daftar Produk PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru.

Produk bagi Penyimpanan Dana (<i>Shahibul Maal</i>)	Produk bagi Pengelola Dana (<i>Mudharib</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tabungan Muamalat 2. Tabungan Muamalat Umroh 3. TabunganKu 4. Tabungan Haji Arafah 5. Giro Wadiah 6. Deposito Mudharobah 7. Deposito Fulinves 8. DPLK Muamalat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piutang Murabahah 2. Piutang Istishna 3. Pembiayaan Mudharabah 4. Pembiayaan musyarakah 5. Rahn (Gadai Syariah)

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru, 2013

Demikian diantara produk-produk yang dipasarkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru. Dikarenakan Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru memiliki beberapa produk yang dipasarkan maka penulis membatasi pembahasan pada produk pembiayaan mudharabah (*kredit mudharabah*) sebagai bahan penelitian tugas akhir penulis, hal ini bertujuan untuk memudahkan proses penelitian dan pembahasan selanjutnya.

Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh

(100%) modal, sedangkan pihak lainnya yang menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru tingkat perkembangan pengelolaan dana dari produk kredit mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dapat dilihat:

Tabel 1.2 :Perkembangan Pengelolaan Dana dari Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru.

Tahun	Jumlah Nasabah (orang)	Jumlah Dana (Rp)
2008	2.667	846.000.000.000
2009	2.917	941.000.000.000
2010	2.998	898.000.000.000
2011	3.046	1.749.000.000.000
2012	3.893	2.067.000.000.000

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru 2013

Dari tabel 1.3 diketahui jumlah nasabah pada tahun 2008 sebanyak 2.667 orang, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 846.000.000.000. Pada tahun 2009 jumlah nasabah bertambah sebanyak 250 orang, menjadi 2.917 orang, dengan dana pinjaman sebesar Rp. 941.000.000.000. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah dana pinjaman mengalami penurunan sebesar

Rp. 898.000.000.000 untuk ketersediaan pada nasabah sebanyak 2.998 orang. Hal ini dikarenakan dana yang ada di BMI tahun 2010 terbatas, dan pada saat itu juga terjadi persaingan dalam perbankan syariah, dimana masing-masing perbankan tersebut berlomba-lomba mencari nasabah untuk menjadi nasabah perbankan mereka. Sedangkan pada tahun 2011 jumlah nasabah mengalami peningkatan kembali sebanyak 48 orang menjadi 3.046 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.749.000.000.000. kemudian Pada tahun 2012 terjadi lagi peningkatan dengan jumlah nasabah sebanyak 847 orang menjadi 3.893 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 2.067.000.000.000.

Dari latar belakang yang dipaparkan maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan lebih lanjut terhadap produk pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dengan judul :**“SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PEKANBARU”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang telah dikemukakan dari latar belakang yang dipaparkan, maka ditarik suatu rumusan permasalahan yaitu “Bagaimanakah sistem pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru”.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui sistem pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru.

2. Manfaat penelitian adalah:

- a. Bagi penulis, untuk mengetahui sistem pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru.
- b. Bagi pihak manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekanbaru penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi tambahan dan masukan bagi perusahaan yang dapat dijadikan pertimbangan didalam perbaikan dan pengembangan perusahaan.
- c. Sebagai acuan bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti masalah ini.

4. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

- a. Lokasi penelitian bertempat pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 417-419 Pekanbaru
- b. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2013

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Jenis Data

1. Data Primer

Yaitu data yang belum jadi dan diperoleh dari sumber objek penelitian dalam hal ini adalah pimpinan perusahaan, staf karyawan dan nasabah.

2. Data Skunder

Yaitu data yang telah jadi dan tersedia pada perusahaan seperti:

- Struktur organisasi
- Data jumlah nasabah

b.Sumber Data

PT.Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru

5. Sistematika Penulisan

Agar penulis lebih sistematis dan terarah maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematik penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini akan membahas tentang sejarah perusahaan, tugas dan wewenang, dan struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan perbankan terutama yang berkaitan dengan sistem kredit yang terdapat pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran dari semua pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah yang pertama di Indonesia, yang merupakan prakarsa MUI dalam lokakarya tanggal 19-22 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Dan dipertegas dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) ke IV MUI tanggal 22-25 Agustus 1990 di Sahid Jaya Hotel, Jakarta. Diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di Indonesia.

Tugas penting yang dilakukan oleh tim MUI disamping pendekatan-pendekatan dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, adalah menyelenggarakan pelatihan calon staf melalui “Management Development Program” yang diselenggarakan oleh lembaga pengembangan perbankan Indonesia (LPPI), tanggal 29 Maret 1992 oleh menteri keuangan, Drs. Nasruddin Sumintapura, MA.

Ikatan cendekiawan muslim Indonesia (ICMI) juga memiliki peran aktif dalam pembentukan bank muamalat ini, dimana ICMI dibentuk beberapa tim yaitu: tim pendanaan, tim hukum, tim anggaran dasar dan komposisi manajemen.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan

berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang-barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank ke pihak lain (*Ijarah Wa Iqtina*).

Pada tanggal 27 Agustus 1991, tim perbankan MUI mengadakan pertemuan dengan presiden dan wakil presiden RI Soeharto dan Soedarmono di Bina Graha berkenaan menjadi pemrakarsa dan merencanakan pertemuan dengan para pengusaha muslim yang akan diadakan pada tanggal 11 Oktober 1991 di Istana Bogor.

Musyawarah Nasional IV, menegaskan dewan pimpinan MUI untuk memprakarsai dan mendirikan bank yang berdasarkan syariah. Selanjutnya dengan perangkatnya tim perbankan membentuk Yayasan Dana Dakwah Pembangunan. Tim inilah yang merintis pendiri bank syariah. Akhirnya presiden dan wakil presiden RI Soeharto dan Soedarmono, berkenan pula menjadi pemeraksa bank yang dimaksud Bank Muamalat Indonesia (BMI).

PT. Bank Muamalat Indonesia berdiri berdasarkan akta notaries No. 1 tanggal 1 November 1991 yang ditandatangani di Hotel Sahid Jaya Jakarta didepan Notaris Yudo Paripurno.S.H dan izin menteri kehakiman No.C2.2413.HT.01.01. tanggal 21 Maret 1992. Berita Negara RI tanggal 28 April 1992 No. 34. Surat menteri keuangan RI No.1223/MK.013/1991

tanggal 24 April 1992 dan semenjak 27 Oktober 1994 telah dipredikatkan sebagai bank devisa.

Pendiri bank muamalat indonesia didukung oleh pengusaha maupun cendekiawan muslim yang tergabung dalam 227 pemegang saham pendiri. Dan juga ikatan cendekiawan Indonesia (ICMI) dengan pembentukan tim pendanaan, tim hukum, dan tim anggaran dasar. Pada penandatanganan akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia telah berkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp.84 milyar.

Pada tanggal 1 November 1991 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1412 H, PT. Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi (Soft Opening) dengan modal dasar Rp. 500 milyar dengan modal disetor sebesar Rp. 106.126.382.000. Sedangkan penentu garis besar kebijaksanaan BMI adalah Dewan Komisaris. Pada hari jumat tanggal 1 Mei 1992 menteri keuangan dengan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia meresmikan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia dalam acara "Soft Opening" yang diadakan di Gedung Arthalo di Jalan Sudirman No.2 Jakarta. Dan kemudian pada tanggal 15 Mei 1992 di Puri Agung Hotel Sahid Jaya. Dalam Grand Opening dilakukan penandatanganan prasasti oleh Wakil Presiden RI waktu itu Soedarmono S.H.

Sejak berdirinya sampai tahun 2005 PT. Bank Muamalat Indonesia telah memiliki 47 kantor cabang 12 kantor cabang pembantu 92 kantor kas, 50 kantor pos dan 2 Unit Pelayanan Syariah (UPS). Salah satu kantor cabang

Bank Muamalat Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jalan Sudirman No. 417-419.

PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru resmi dibuka pada tanggal 4 Mei 2000 yang diresmikan oleh Gubernur Riau H. Saleh Djasit, SH. Disaksikan oleh Bupati Gubernur Bank Indonesia, Cendekiawan, dan sebagian besar masyarakat Pekanbaru. Lebih kurang satu bulan diresmikan tepatnya pada bulan Oktober 1999, PT. Bank Muamalat Indonesia telah ada di Pekanbaru berkantor dimutiara merdeka hotel. Namun belum beroperasi sebagaimana mestinya karena masih dalam tahap promosi dan informasi. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru diresmikan setelah sebulan sebelumnya. Bank Muamalat Indonesia ini terlebih dahulu dibuka di Medan (Sumatra Utara) yaitu pada tanggal 17 April 2000.

Kemudian PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru pernah juga beroperasi di Jalan Sudirman tepatnya disimpang Jl. Juanda dari tahun 2004-2005, namun belum berbentuk bank masih berbentuk kantor kas Bank Syariah Muamalat Indonesia. Kemudian pada tahun 2005 sampai sekarang 2013 Kantor Cabang PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru beroperasi di Jalan Jendral Sudirman tepatnya disimpang Jl. Pandan No. 417-419.

Dengan dibukanya PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru, masyarakat Riau umumnya, dan masyarakat muslim Pekanbaru khususnya dapat menjadikan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru ini sebagai alternatif lain dalam melakukan hubungan perbankan yang selama ini

hanya berfokus pada Bank Konvensional. Disamping itu juga PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru mengarahkan usahanya untuk membantu masyarakat ekonomi lemah.

Ada beberapa hal, yang memotivasi dibukanya PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru, di kota Pekanbaru ini yaitu:

1. Merupakan strategi bank untuk memperluas jaringan, karena hal ini akan menambah eratnya hubungan bank dengan nasabahnya.
2. Riau merupakan “Muslim Area”.
3. Permintaan dari masyarakat Riau sendiri
4. Melihat perkembangan masyarakat Riau semakin produktif.

Tujuan dari pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru ini bukan sekedar mengejar laba, akan tetapi tujuan utamanya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional.
2. Meningkatkan partisipasinya masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi.
3. Mengembangkan lembaga bank dan system perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga meneggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan di daerah-daerah terpencil.

4. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomi, berperilaku bisnis, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam aktivitasnya sehari-hari PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru menggunakan system komputerisasi online yang dinamakan KIBLAT (Komputer Informasi Bank Layanan Aplikasi Terpadu), yang langsung tersalur dengan Bank Muamalat Indonesia pusat.

2. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru

Visi Bank Muamalat Indonesia

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru mempunyai visi sebagai berikut: “Menjadi Bank Syari’ah utama di Indonesia yang dominan dipasar spiritual, dan dikagumi dipasar rasional”.

Misi Bank Muamalat Indonesia

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru mempunyai misi sebagai berikut: “Menjadi Role model lembaga keuangan syari’ah di dunia, dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada *Stake Holder*.”

3. Struktur Organisasi

Dalam suatu perusahaan struktur organisasi mempunyai arti yang sangat penting oleh sebab itu perlu adanya struktur organisasi yang baik.

Adapun struktur organisasi yang baik yaitu memberikan staffing yang baik, memberikan directing yang baik pula sehingga disini akan memudahkan controlling. Controlling ini diperlukan untuk melihat budgeting pada suatu perusahaan yang mana budgeting ini merupakan suatu laporan yang kemudian dilaporkan kepada pemimpin.

Didalam struktur organisasi akan tergambarkan pembagian tugas secara jelas oleh masing-masing bagian atau orang yang terlibat dalam organisasi. Dengan adanya struktur yang baik, maka pembagian suatu tenaga kerja yang akan mudah untuk dilaksanakan sehingga semua yang direncanakan akan tercapai dengan tujuan yang diinginkan.

Untuk mengetahui lebih jelas lagi struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru sebagai berikut:

4. Tugas dan Wewenang Organisasi

Tugas dan wewenang pada struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama

- a. Memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan persero dan senantiasa berusaha meningkatkan efesiensi dan efektifitas perseroan.
- b. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perseroan.
- c. Melakukan supervise dan monitoring terhadap segenap kantor cabang atas pelaksanaan atau tujuan jalannya operasional.
- d. Melakukan konsolidasi terhadap pembuatan dan monitoring laporan-laporan bulanan keuangan bank dan mnyampaikan pada pihak intern atau ekstern yang berkepentingan.
- e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan repegawaitmen dan selekse calon karyawan, proses administrasi kegiatan penempatan dan penempatan kembali karyawan serta memonitoring dan memelihara data base kepersonalia.
- f. Melakukan koordinasi dalam penyediaan sarana logistik dalam rangka persiapan pembukaan atau pengembangan kantor cabang meliputi jaringan komunikasi dan sarana penunjang operasional lainnya.
- g. Melakukan koordinasi terhadap pengelola sistem komunikasi data untuk mendukung operasional online pusat pengelola data keseluruhan cabang Bank Muamalat Indonesia berkoordinasi dengan pihak ekstern.

2. Financing Support Division

- a. Menjelaskan data dari account manager untuk dilaksanakan proses pembiayaan.
- b. Menjalankan segala kehiatan yang berhubungan dengan pembiayaan berdasarkan buku pedoman kerja operasional cabang.
- c. Melakukan penilaian dan analisa terhadap permohonan pembiayaan dan mnegajukan rekomendasi kepada pimpinan cabang.
- d. Melakukan pengawasan secara fisik atas agunan pembiayaan dan mengasuransikan agunan yang menurut siftanya harus diasuransikan.
- e. Mengadakan penilaian serta pengecekan keaslian atas surat-surat jaminan.
- f. Mempersiapkan dan menyelesaikan akad (kesepakatan) pembiayaan dan pengikatan jaminan di notaris.
- g. Membuat tanda terima penyerahan atau penerimaan surat-surat jaminan.
- h. Melaksanakan penagihan terhadap debitur atas kewajiban yang harus dilunasi.
- i. Membuat surat peringatan dan teguran kepada debitur yang lalai memenuhi kewajiban.
- j. Melaksanakan pengarsipan dan filling yang berhubungan dengan pembiayaan.
- k. Menguasai secara fisik debitur macet.

3. Human Resources Division

- a. Menganalisa dan mengembangkan sistem remunerasi di perusahaan sebagai rekomendasi untuk meningkatkan motivasi karyawan dan mendukung pencapaian target kinerja perusahaan.
- b. Menata dan menverifikasi data/pencatatan kehadiran pekerja, surat perintah lembur, shift, cuti, training, dinas, dan medikal. Sehingga dapat dipakai sebagai dasar yang benar dalam membayarkan kompensasi dan benefit (sarly, allowance, incentive, dan iuran pension/asuransi).
- c. Melakukan proses payroll berdasarkan data yang benar sehingga pembayaran gaji dapat dilakukan dengan jumlah yang benar dan tepat waktu.
- d. Memverifikasi expence report yang diajukan pekerja atas perjalanan dinas, cuti dan training, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan benar.
- e. Memproses administrasi perjalan dinas diluar negeri, sehingga perjalanan dapat dilakukan dengan tepat waktu dan lancar.
- f. Menyelenggarakan administrasi asuransi/pension/pajak dan pengakhiran pekerjaan sesuai dengan ketentuan, agar setiap proses pembayaran dapat dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu.

4. Area Manager

- a. Mengkoordinir dan membawahi kepala bagian operasional sesuai direktur organisasi.
- b. Turut bertanggung jawab terhadap terlaksananya pengelolaan operasional kantor cabang secara baik.

- c. Dapat mewakili pemimpin cabang dimana pemimpin cabang berhalangan.
- d. Memberikan pertimbangan serta asal usul konkrit kepada pimpinan cabang untuk pengembangan cabang.
- e. Bertindak untuk dan atas nama pemimpin cabang untuk menandatangani surat-surat berharga. Surat keluar masuk berdasarkan surat kuasa yang diterima bersama-sama dengan pejabat yang ditujukan oleh direksi.
- f. Memimpin rapat-rapat intern, membina dan meningkatkan keterampilan karyawan, bertanggung jawab terhadap tegaknya disiplin karyawan dan ketertiban administrasi.
- g. Memimpin dan mengawasi serta mengkoordinir pekerjaan seksi layanan kas dan operasi.
- h. Bertanggung jawab kepada pemimpin cabang

5. Internal Audit Division

- a. Berwewenang untuk melakukan akses terhadap catatan karyawan, sumber daya dan dana serta asset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
- b. Memeriksa dan menilai atas kecukupan dari struktur pengendalian intern.
- c. Memeriksa dan menilai kualitas kerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah dilaksanakan.

- d. Memberikan saran perbaikan baik untuk kecukupan dan efektifitas atau kehandalan struktur pengendalian intern maupun perbaikan pelaksanaan.
- e. Memberikan informasi dan saran kepada manajemen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan upaya menjadikan bank lebih maju.

6. Financing Risk Division

- a. Mengkoordinir strategi perumusan strategi jangka panjang sebagai dasar perumusan kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) dengan bekerja sama dengan direksi lainnya.
- b. Melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi dan menanggulangi berbagai jenis resiko financial yang dapat dihadapi oleh perusahaan dengan berkoordinasi dengan direksi lainnya
- c. Memastikan agar seluruh unit usaha dan wilayah kerja perusahaan mematuhi disiplin dan Standar Operating Procedur (SOP) keuangan yang berlaku untuk masing-masing fungsi sesuai dengan rencana yang telah disetujui.
- d. Membangun strategi dan berusaha mencapai hasil bisnis yang optimal dari pelaksanaan seluruh usaha perusahaan.

Memastikan ketersediaan dan dan operasional oleh perusahaan untuk kegiatan operasional sehari-hari dengan melakukan koordinasi erat dengan para pemimpin unit usaha.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. TINJAUAN TEORI

1. Pengertian Bank

Menurut undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dana menyalurkan dana. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya(Kasmir, 2008:11).

Sedangkan menurut (Veryn Stuart, 2003:12) bank merupakan salah satu badan lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Kemunculan suatu bank hanya bersifat dibidang konvensional, maka justru menggunakan perbankan dengan sistem syariah. Pendapat lain tentang Bank Syariah atau bank bagi hasil merupakan bank-bank yang beroperasi

dengan prinsip-prinsip syariah. Di dalam operasinya bank syariah mengikuti aturan Al-qur'an, hadist, dan regulasi dari pemerintah. Sesuai dengan perintah dan larangan syariah, maka praktik-praktik yang mengandung unsur riba dihindari, sedangkan yang diikuti adalah praktik-praktik yang dilakukan dizaman Rasulullah SAW (Martono, 2002:94).

2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank konvensional dan bank syari'ah dalam beberapa hal memiliki persamaan terutama dalam fungsi bank, sisi penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan syarat-syarat umum untuk mendapatkan pembiayaan. Seperti KTP. NPWP, proposal laporan keuangan dan lain-lain.

Dalam persamaan ini, semua hal yang terjadi pada bank syari'ah itu sama persis dengan yang terjadi pada bank konvensional. Perbedaan pokok antara sistem bank syariah dengan bank konvensional secara singkat dapat dilihat dari empat aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Falsafah : pada bank syari'ah tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan. Sedangkan pada bank konvensional berdasarkan bunga.
2. Operasional : pada bank syari'ah dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. sedangkan pada bank konvensional, dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Pada sisi

penyaluran, bank syari'ah menyalurkan sedangkan pada bank konvensional aspek halal tidak menjadi pertimbangan.

3. Sosial : pada bank syari'ah aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan, sedangkan bank konvensional tidak secara tegas
4. Organisasi : Bank Syari'ah harus memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), sedangkan Bank Konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).

1. Pengertian Kredit Mudharabah (Pembiayaan Mudharabah)

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil(Kasmir, 2008:73).

Mudharabah berasal dari kata *dharaba yadhribu* yang berarti memukul atau berjalan, yakni melakukan perjalanan untuk menjalankan usahanya. Mudharabah dalam istilah lain juga disebut dengan *qiradh*, yang diambil dari kata *qaradh* yang artinya memotong. Dinamakan demikian karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk dijalankan usahanya oleh amil dan memotong sebagian dari keuntungannya(Ahmad Wardi, 2010:336).

Menurut **Heri Sudarsono** , (2004:69) pengertian mudharabah adalah, akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal. Sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sepengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah merupakan ciri khas dari ekonomi syariah, yang lebih mengedepankan hubungan kerja sama diantara dua atau lebih pihak. Konsep mudharabah bukan merupakan turunan dari konsep ekonomi konvensional. Ini berbeda dengan produk pada perbankan syariah lainnya yang sebagian besar merupakan turunan dari produk bank konvensional ditambah dengan pendekatan akad atau konsep syariah.

Sedangkan menurut **Wahba Zuhaili**, (2003:83) pengertian mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh sipemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.

Menurut ahli fiqih, mudharabah merupakan seseorang memberikan hartanya kepada orang suatu perjanjian dimana lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak (Ahmad Wardi, 2010:30).

Seperti yang dikemukakan oleh **Abdurrahman. (2004:67)** pengertian mudharabah adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu ditawarkan oleh pemiliknya kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*joint partnership*) yang diantara kedua pihak kemitraan akan berbagi keuntungan.

Dalam transaksi mudharabah ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahibul maal dalam manajemen proyek. Sebagai seorang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil shahibul maal dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Sedangkan menurut **Kazarian, (2003:62)** pengertian mudharabah adalah sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak dimana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan (*shahibul maal*), mempercayakan dana kepada pihak lainnya. Mudharib mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada shahibul maal ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

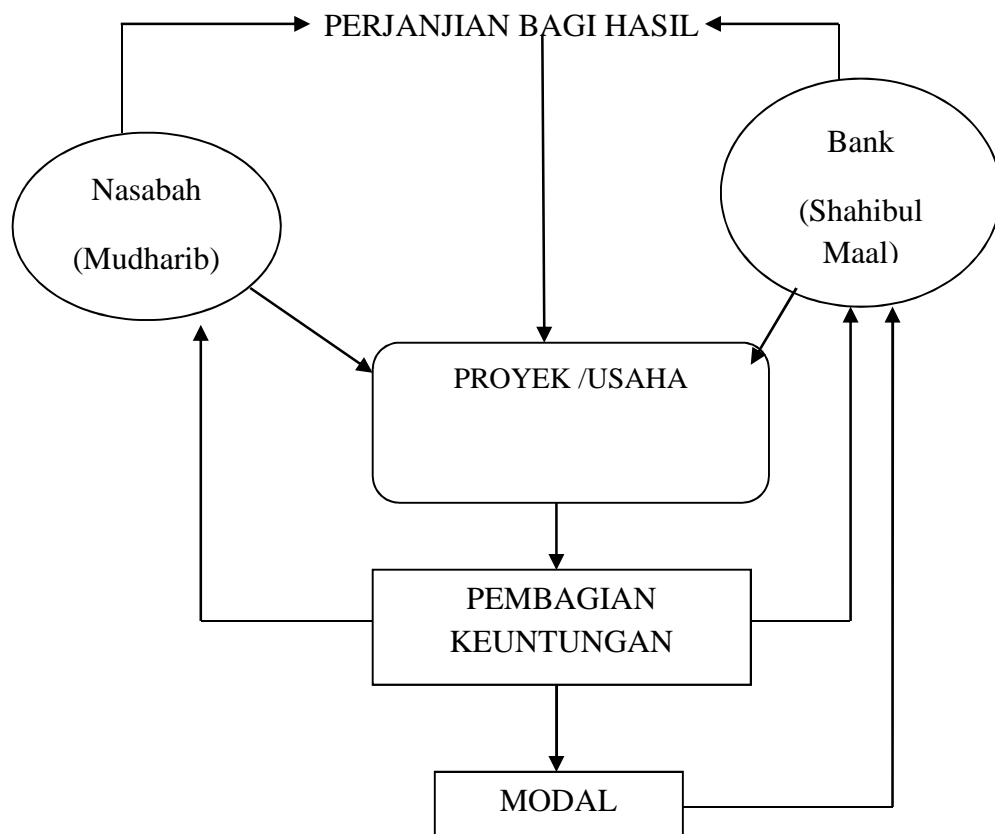
Menurut **Muhammad, (2006:18)** pengertian mudharabah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah.

Sedangkan menurut **Karnaen, (2007:77)** *mudharabah* adalah pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai dengan kesepakatan.

Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. *Shohin al-maal* (investor) memanfaatkan keahlian *Mudharib* (pengelola) dan *Mudharib* (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa *mudhrabah* adalah suatu akad perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara modal dengan tenaga kerja atau keahlian. Dengan demikian, dalam *mudharabah* ada unsur *syirkah* atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan keahlian. Disamping itu, juga terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan.

Apabila terjadi kerugian maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pengelola (*mudharib*) tidak terbebani. Namun apabila kerugian terjadi disebabkan oleh kelalaian pengelolaan (*mudharib*) maka kerugian ditanggung oleh pengelola (*mudharib*).



Gambar 3.1. sistem pembiayaan

2. Konsep Bunga dan Bagi Hasil

Pemahaman tentang bunga sama dengan riba semakin luas, namun tetap saja di sana sini orang menuntut suatu penjelasan yang tidak hanya bersifat dogmatis tetapi juga dapat diterima akal sehat. Apalagi sudah sekian lama otak masyarakat “diduduki” terlebih dahulu oleh segala macam kegiatan

ekonomi yang berbasis bunga. Pelajaran ekonomi diperoleh sejak disekolah sampai diperguruan tinggi segala perhitungan ekonomi selalu dengan pranata bunga. Sehingga dapat dipahami, apabila sangat sulit untuk secara langsung menerima kenyataan bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan agama islam. Berbagai dalil untuk menghalalkan bunga bank telah dicobakan orang sepanjang sejarah. Namun, sistem bunga yang secara makro tidak mampu memberikan solusi terhadap problematika ekonomi, telah mendorong para cendekiawan untuk mencari alternative dengan menerapkan system syari'ah tanpa harus mengatakan bahwa bunga bank sama dengan riba yang diharamkan.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu:

1. Profit Sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak

mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

2. Revenue Sharin

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).

Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.

Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Berbeda dengan *revenue* di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.

Revenue pada perbankan Syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Perbankan Syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

3. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah

Melakukan mudharabah atau qiradh adalah boleh (mubah). Dasar hukum yang melandasinya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Syaib, Rasulullah SAW bersabda : “Ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan : menjual dengan pembayaran secara angsuran, muqaradah (nama lain mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual”.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib “jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengurangi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau yang membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika meyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas

dana tersebut. Disampaikansyarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya”.(HR. Thabrani)

4. Landasan Syari’ah

Mudharabah adalah salah satu jenis transaksi musyarakah dimana pihak yang bersyirkah adalah pemilik modal (*shahibul maal*) dan pemilik tenaga (*mudharib*). Dalam hal ini islam telah mengajarkan melalui ayat-ayat-Nya.Surat Al-Baqarah, Ayat 282:





Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

Dari ayat tersebut, secara umum membolehkan umat islam dalam melakukan transaksi mudharabah, yang bekerja sama dalam mencari rezeki. Dan dari ayat tersebut juga mengajarkan agar perjanjian-perjanjian dibuat secara tertulis, maka sebaiknya perjanjian mudharabah dibuat secara tertulis dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat secara tegas dan jelas untuk menghindari salah tafsir yang secara lebih lanjut dapat menimbulkan salah pengertian yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat antara shahibul maal dan mudharib.

5. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi atas dua jenis, yaitu

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah usaha. Disini *shahibul maal* memberikan kekuasaan sangat besar kepada *si mudharib*.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan usaha, waktu dan daerah usaha (M. Syafi'I Antonio, 2003:137).

8. Syarat dan Rukun Mudharabah

Dalam pembiayaan mudharabah harus ada rukun dan syarat yang dipenuhi diantaranya :

1. Modal penyertaan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Modal harus berupa tunai
 - a. Modal harus jelas dan diketahui ukurannya, apabila modal *mudharabah* tidak jelas maka modal tidak sah.
 - b. Modal harus ada dan tidak boleh hutang tetapi tidak berarti harus ada pada saat akad.
 - c. Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha.
- b. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

- c. Penyertaan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :
 - a. Keuntungan harus diketahui jumlahnya.
 - b. Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau persentase yang telah disepakati pada saat akad.
- e. Shahibul maal menanggung semua kerugian yang terjadi dan mudharib tidak boleh menanggung kerugian tersebut, kecuali kerugian terjadi disebabkan oleh kelalaian mudharib atau pelanggaran kesepakatan.

9. Ketentuan Penyaluran Dana Pembiayaan Mudharabah

Menurut **Muhammad (2006:56)**, ketentuan pelaksanaan kontrak mudharabah atau penyaluran dana dengan kontrak mudharabah di bank syari'ah diatur dalam Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000. Sebagai berikut:

- a. Penyaluran dana mudharabah adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam penyaluran dana ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah. Dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana penyaluran dana harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam penyaluran dana mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur penyaluran dana, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

- i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- j. Dalam hal penyandang dana Lembaga Keuangan Syari'ah tidak melakukan kewajiban atau pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapatkan ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan.

10. Sistem Penyeleksian untuk Mengurangi Risiko Pembiayaan Mudharabah

Bank syari'ah merupakan lembaga bisnis yang berbasis amanah. Sebagai lembaga bisnis amanah, maka pada saat akan memasuki kontrak bisnis dengan prinsip pembiayaan mudharabah, maka pihak bank harus memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan mudharabah. Agar terhindar dari resiko-resiko yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan yang bermasalah, maka pihak bank harus benar-benar melakukan sistem penyeleksian yang cermat terhadap calon nasabah, diantaranya sebagai berikut:

a. Risiko Bisnis Minimal

Bisnis tidak dapat dipisahkan dengan risiko. Risiko bisnis minimal merupakan proyek yang memiliki risiko kegagalan minimal.

b. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi merupakan aspek penting bagi proyek yang dibiayai dengan pembiayaan mudharabah. Sebab pembiayaan mudharabah

merupakan kontrak yang menuntut adanya pelaporan yang tertib, transparansi, dan benar. Sistem Informasi Akuntansi yang dimaksud adalah sistem pencatatan hasil usaha yang dilakukan oleh pengelola dana sebagai dasar penentuan bagi hasil bagi kedua belah pihak yang melakukan pembiayaan mudharabah.

c. Kepastian Hasil Usaha

Pihak bank syari'ah memaknai kepastian hasil usaha berarti mendapatkan kembalian hasil usaha atau bagi hasil yang dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian mudharabah.

d. Tingkat *Return* Proyek

Proyek yang tidak memiliki return akan diabaikan oleh pihak bank syari'ah. Dengan demikian, proyek yang memiliki tingkat return yang baik merupakan aspek yang diperhatikan dalam pembiayaan mudharabah.

e. Tingkat Kesehatan Usaha

Proyek yang sehat adalah proyek yang memiliki rasio keuangan dan manajemen yang baik.

f. Jaminan atas Proyek

Jaminan sesungguhnya hanyalah untuk mengikat dan menciptakan kesungguhan nasabah yang mendapatkan pembiayaan. Agar pemilik dapat memperoleh modal dan keuntungannya kembali secara tepat waktu. Maka ia dapat menerapkan jaminan kepada pengelola dana.

g. Jangka Waktu Kontrak

Jangka waktu pembiayaan adalah lamanya waktu pembiayaan yang disepakati antara pemilik dana dengan pengelola danayang dituangkan dalam kontrak perjanjian.

h. Usia / Lama Proyek

Pihak bank memaknai usia / lama proyek adalah proyek telah berusia atau usaha telah berjalan Selama tiga tahun.

i. Prospek Proyek Baik

Menurut pihak bank, prospek proyek adalah gambaran tetang proyek yang memiliki kelayakan usaha, pasar, produk, return bisnis, dan aspek-aspek bisnis lainnya.

j. Kelangsungan Perkembangan Usaha

Kelangsungan usaha merupakan suatu keadaan bahwa usaha yang akan dibiayai merupakan usaha yang didirikan telah berkembang bukan usaha yang baru berdiri.

11. Kredit Macet (Pembiayaan Bermasalah)

Setiap perbankan tentu berharap bahwa semua pembiayaan yang diberikan akan menjadi pembiayaan yang lancar. Sehat, dan bermanfaat bagi penerimanya. Namun harapan tersebut tidak selamanya terwujud. Adakalanya pembiayaan yang diberikan menjadikan pembiayaan yang bermasalah, dimana nasabah tidak mampu membayar kewajibannya sehingga terjadi tunggakan baik, baik berupa tunggakan pokok, margin pembiayaan, maupun tunggakan

kewajiban bagi hasil. Ada dua factor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Baik yang bersifat internal maupun eksternal sebagai berikut:

1. Dari pihak perbankan

Analisis yang dilakukan pihak bank kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah akibat 2 hal yaitu:

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- b. Adanya unsure tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu.

12. Restrukturasi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang bermasalah dapat terjadi melalui beberapa factor, yang dapat merugikan bank (*shahibul maal*). Untuk itu bank dapat melakukan penyelamatan sebelum terjadi pembiayaan bermasalah.

Bank Indonesia melalui PBI Nomor 10/18/PBI/2008, telah mengatur ketentuan mengenai restrukturasi bagi perbankan syariah. Restrukturasi

pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah dalam agar dapat menyelesaikan kewajibannya melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*). Yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan / atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 2. Konversi akad pembiayaan
 3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syari'ah berjangka waktu menengah.
 4. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

B. TINJAUAN PRAKTEK

1. Sistem Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu bentuk transaksi dan berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah, yang diterapkan oleh PT. Bank

Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dalam melayani nasabah. Pembiayaan mudharabah merupakan produk yang sangat penting, karena melalui produk ini fungsi bank dapat terlaksana. Yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkannya, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Adapun substansi operasional mudharabah pada Bank Muamalat adalah:

- a. Ada modal (shahibul maal)
- b. Ada pengusaha atau pengelola (mudharib)
- c. Ada modal yang akan diusahakan menurut ketentuan hukum yang berdasarkan syari'at islam, dimana terjamin dari unsure-unsur yang dilarang syari'at.
- d. Ada akad (ajab dan Qabul)
- e. Keuntungan

Dalam perbankan memiliki fungsi tertentu yaitu, menghimpun dana dan menyalurkan dana. Seperti yang telah dilaksanakan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru, dimana dana dihimpun melalui tabungan nasabah yang mempercayakan menyimpan uangnya di Bank Muamalat, maka dana tersebut yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya diantaranya melalui pembiayaan mudharabah.

Dalam proses penyaluran dana kepada masyarakat PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang pekanbaru memiliki sistem dalam memberikan pembiayaan

mudharabah. Adapun sistem pemberian mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru sebagai berikut:

1. nasabah mengajukan proposal pembiayaan kepada Bank Muamalat Indonesia, dengan mencantumkan jenis usaha, nominal pembiayaan serta mencantumkan syarat-syarat yang telah ditetapkan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang pekanbaru
2. proposal diterima oleh pihak Bank Muamalat Indonesia untuk melakukan pencairan info dari nasabah
3. pihak Bank Muamalat Indonesia mengadakan pertemuan awal dengan calon pengelola serta menganalisa calon nasabah dengan mempertimbangkan 5C yaitu:
 - a. Character
Yaitu suatu keyakinan sifat, watak dari ornga yang akan diberikan pembiayaan apakah benar-benar dapat dipercaya.
 - b. Capital
Yaitu untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank
 - c. Capability
Yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya dalam mencari laba.
 - d. Collectoral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

e. Condition

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sector masing-masing.

4. selanjtnya adalah mempertimbangkan 7P yaitu:

a. Personality

yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalu.

b. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda pula dari bank.

c. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

d. Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang mereka inginkan.

e. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

f. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga pembiayaan yang diberikan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan.

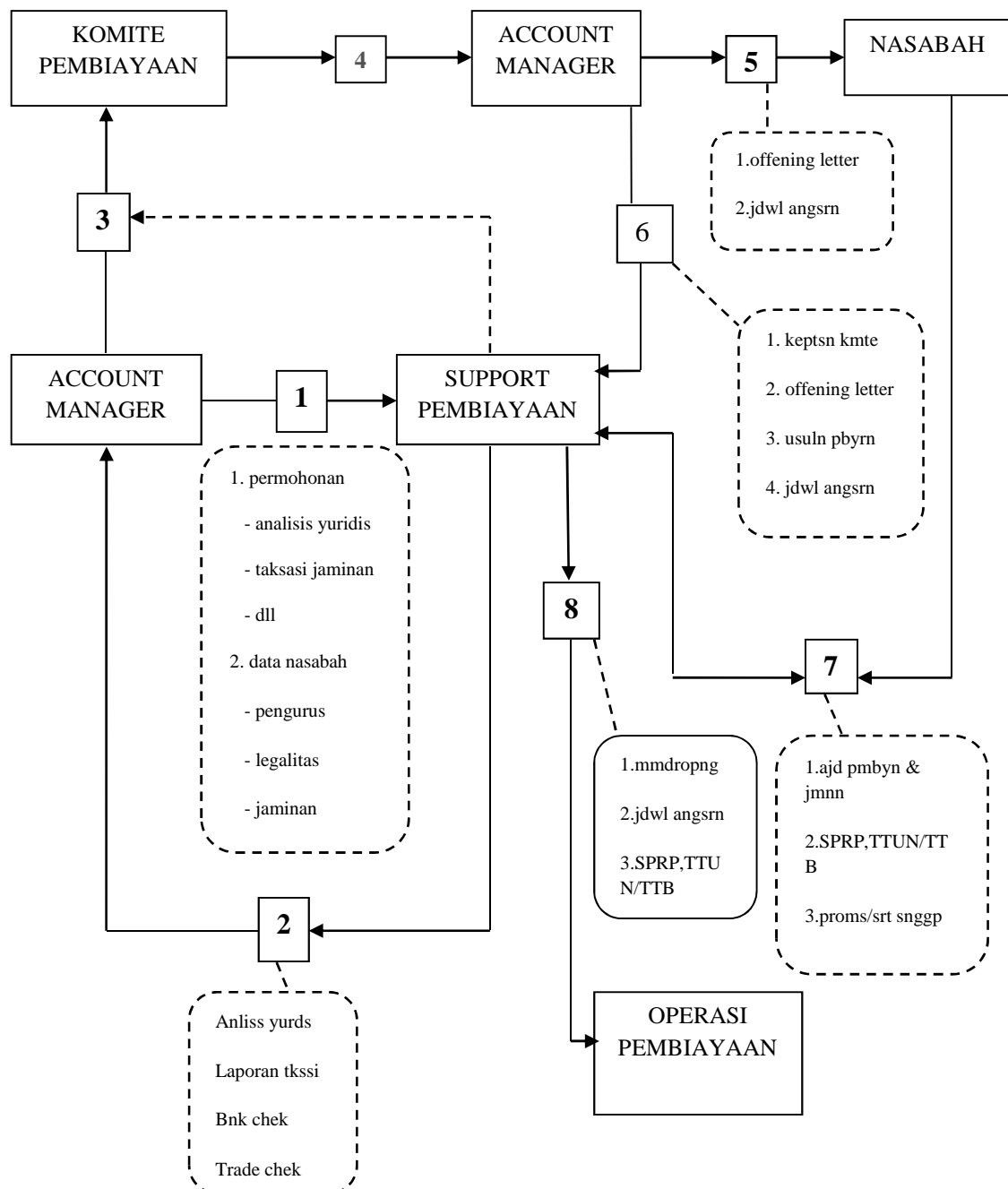
5. setelah itu pihak Bank Muamalat Indonesia mengambil keputusan apakah proposal nasabah tersebut dapat dilanjutkan atau tidak.
6. Pihak Bank Muamalat Indonesia melakukan analisis pembiayaan menilai, dan penyelidikan serta menyiapkan dokumen yang diperoleh.
7. Setelah proposal diterima oleh komite hasil permohonan tersebut dipersentasikan oleh account officer kepada pimpinan Bank Muamalat Indonesia untuk mendapat persetujuan atas pemberian pembiayaan untuk modal usaha yang diajukan calon nasabah. Apabila disetujui, account officer menundang pemohon datang ke Bank Muamalat untuk diberi penjelasan mengenai pembiayaan kerja sama yang diberikan. Setelah ada kesepakatan baru dapat dilakukan

penandatanganan akad pembiayaan dan selanjutnya melakukan aikatan secara hukum dihadapan notaries.

8. Kemudian proses pencairan modal yang akan diberikan kepada pengelola. Adapun media yang diperlukan dalam pembiayaan adalah:

- a. Take down sheet yaitu lembaran kerja yang memuat tentang proses pembiayaan
- b. Tanda terima barang atau uang nasabah (TTUN) yaitu surat pernyataan menyangkut nasabah bahwa ia benar-benar telah menerima sejumlah uang atau barang dari Bank Muamalat sebagai modal usaha dengan bentuk kerja sama bagi hasil berdasarkan persetujuan yang disepakati.

9. Pengawasan atas pembiayaan yang telah diberikan, pengawasan ini adalah kegiatan dalam rangka melakukan pengawalan sejak pembiayaan dicairkan hingga dilunasi.



Gambar 3.2. flowchart pembiayaan mudharabah

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia

2. Syarat Permohonan Pembiayaan Mudharabah

Data yang dilakukan oleh bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan adalah data yang menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Data yang diperlukan antara lain:

1. Untuk pegawai
 - a. Kartu identitas calon nasabah dan istri: Kartu Tanda Penduduk
 - b. kartu keluarga, surat nikah
 - c. Slip gaji terakhir
 - d. Surat referensi dari kantor tempat bekerja atau SK pengangkatan untuk Pegawai Negeri Sipil
 - e. Salinan rekening bank tiga bulan terakhir
 - f. Salinan tagihan rekening telepon dan listrik
 - g. Data objek pembiayaan

2. Untuk pengusaa perorangan
 - a. kartu identitas calon nasabah suami dan istri
 - b. kartu keluarga, surat nikah
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - e. Salinan rekening bank tiga bulan terakhir
 - f. Salinan tagihan rekening telepon dan listrik tiga bulan terakhir
 - g. Data objek pembiayaan
 - h. Data jaminan.
3. Untuk pembiayaan konsumtif dengan pengajuan minimal 50 juta
yaitu:
 - a. KTP suami istri sebanyak dua lembar
 - b. Kartu keluarga, surat nikah
 - c. Surat persetujuan suami istri
 - d. Slip gaji tiga bulan terakhir
 - e. Surat referensi dari kantor tempat kerja
 - f. Nomor Pajak Wajib Pajak
 - g. Data jaminan (tanah, bangunan, atau kendaraan yang dibeli)
 - h. Salinan rekening bank tiga bulan terakhir
 - i. Angsuran tidak melebihi dari gaji pokok
4. Untuk pembiayaan koperasi, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak

- c. AD atau ADRT koperasi dan perubahannya
- d. Surat pengesahan dari departemen koperasi
- e. Susunan pengurusan koperasi yang disahkan oleh departemen koperasi
- f. Laporan keuangan dua tahun terakhir
- g. Laporan rapat anggaran (RAT) tahunan selama 2 tahun terakhir
- h. Data jaminan

5. Untuk pembiayaan PT dan CV

- a. Surat permohonan
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak
- c. Surat Izin Usaha
- d. Fotocopy KTP direksi
- e. Company Profile
- f. Akad pendirian dan perubahan
- g. Surat pengesahan dari departemen kehakiman
- h. Salinan rekening bank tiga bulan terakhir
- i. Laporan keuangan dua tahun terakhir
- j. Data jaminan
- k. Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha

3. Factor-faktor yang dipertimbangkan untuk Menyetujui Pemberian Pembiayaan Mudharabah

Didalam mempertimbangkan pembiayaan yang telah diajukan calon nasabah kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Latar belakang permohonan pembiayaan yang diajukan, meliputi:
 - a. Jumlah permohonan
 - b. Tujuan penggunaan pembiayaan
 - c. Jangka yang diajukan
 - d. Agunan yang diajukan
2. Informasi nasabah
 - a. Nama pemohon, bila perusahaan disebutkan nama badan usahanya.
 - b. Alamat rumah, yaitu alamat tinggal pemohon sesuai kartu identitas pemohon
 - c. Alamat domisili, yaitu alamat tinggal an status tempat tinggal saat ini
 - d. Alamat usaha, yaitu alamat pekerjaan, alamat kantor, atau pabrik
 - e. Bidang usaha, yaitu bidang usaha/pekerjaan yang dijalankan oleh pemohon
 - f. Susunan pengurus, yaitu nama dan jabatan para pengurus/pengelola badan usaha sesuai legalitas terakhir
 - g. Lama usaha, yaitu umur operasional perusahaan

- h. Grup usaha, yaitu badan usaha yang masih satu grup karena manajemen atau kepemilikan yang sama.
3. Aspek yuridis, merupakan analisis terhadap keabsahan permohonan atas kelengkapan legalitas usahanya.
 4. Aspek karakter dan manajemen merupakan analisis yang mengkaji sejauh mana reputasi pemohon dalam menjalankan usaha khususnya dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.
 5. Aspek teknis dan produksi, dalam aspek ini meliputi:
 - a. Pola usaha yang dijalankan
 - b. Proses produksi
 - c. Kapasitas produksi
 - d. Jenis produk yang dihasilkan
 - e. Mesin-mesin yang dimiliki
 6. Analisis aspek pemasaran untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memasarkan produk/jasa hasil usahanya termasuk realisasi dan rencana penjualan sehingga mendukung alasan bahwa calon nasabah memang memerlukan tambahan modal kerja baru atau membutuhkan investasi.
 7. Analisis aspek keuangan, merupakan analisis aspek kuantitatif. Tujuan aspek ini adalah mengetahui kondisi usaha calon nasabah secara financial, menentukan jumlah pembiayaan yang pantas dan wajar, hal-hal pokok yang dianalisis dalam laporan keuangan adalah:

- a. Analisis laporan keuangan neraca dan laba/rugi, yaitu analisis atas kewajiban laporan keuangan beserta pos-pos yang ada dalam laporan keuangan.
 - b. Analisis mutasi rekening bank
 - c. Analisis kebutuhan modal kerja, merupakan rekomendasi jumlah pembiayaan wajar yang dapat diberikan berdasarkan analisis atas aspek-aspek keuangan tersebut.
8. Analisis aspek agunan, merupakan penjelasan mengenai spesifikasi asset yang dijaminkan, berapa nilai pasar dan nilai likuiditasnya, dan yang paling penting adalah nilai dari *collateral coverage* agunan.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan sitem pembiayaan mudaharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dimulai dengan pengajuan proposal dari calon nasabah kemudian pihak bank melakukan analisan terhadap calon nasabah apakah pembiayaan mudharabah layak atau tidak, dengan memperhatikan beberapa factor diantaranya adalah jumlah permohonan, tujuan penggunaan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, dan agunan yang diajukan. Beberapa factor ini sangat berpengaruh untuk berjalannya pembiayaan yang sehat.
- b. Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama sekurang-kurangnya dua pihak, dimana satu pihak menyediakan modal (Shahibul maal), dan mempercayakan modal tersebut pada pihak lainnya (mudharib) untuk melakukan suatu usaha. Mudharib mengembalikan pokok modal kepada shahibul maalditambanh keuntungan suatu pembagian sesuai nisba, dan kerugian ditanggung olehshahibul maal, namun apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian mudharib yang menanggungnya seluruh kerugian.Keistimewaan system mudharabah adalah karena adanya peran ganda mudharib , bisa sebagai wakil sekaligus mitra, mudharib adalah wakil pemilik dana

dari setiap transaksi yang ia lakukan dan ia juga menjadi mitra pemilik dana ketika ada keuntungan .

2. Saran

- a. Diharapkan kepada pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru agar meningkatkan promosi kepada masyarakat tentang produk-produk syariah. Agar masyarakat khususnya umat islam terhindar dari bunga (riba), sehingga tindakan yang dilakukan bermanfaat secara duniawi dan tidak melanggar kaidah-kaidah syariah yang akan dipertanggung jawabkan secara ukhrawi (mengenai akhirat).
- b. Diharapkan kepada pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru untuk memperhatikan penyeleksian calon nasabah secara cermat, agar penempatan sistem pembiayaan mudharabah berjalan sesuai kaidah dan terhindar dari resiko-resiko yang dapat merugikan pihak bank dan masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Abdurrahman, 2004, **Syari'ah**, Quanta, Bandung.

Ahmad, Wardi, 2010, **Perbankan Islam**, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Heri, Sudarsono, 2003, **Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah**, Abadi, Jakarta.

Karnaen A.Perovatmadja, Hendri, Tanjung, 2007, **Bank Syari'ah**, PT. Senayan Abadi, Jakarta.

Kasmir, 2008, **Manajemen Perbankan**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kazarian, 2003, **Hukum Islam**, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.

M.Syafi'I, Antonio, 2003, **Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum**, Zikrul Hakim, Jakarta.

Martono, 2002, **Bank dan Lembaga Keuangan**, Ekonosia, Yogyakarta.

Muhammad, 2004, **Manajemen Dana Bank Syari'ah**, Penerbit Jalasutra, Yogyakarta.

———, 2006, **Bank Syari'ah**, Edisi ke2, Ekonosia, Yogyakarta.

Wahbah, Zuhaili, 2003, **Al-Fiqh Islamiyah**, Dar-al-Fikr, Damaskus.

Yusak, Laksamana, 2009, **Account Offecer**, PT.Alex Media Kompotindo, Jakarta.

<http://ulohtengpay.blogspot.com/2009/05/konsep-bagi-hasil-dalam-perbankan.html>